



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DESA BANJARWANGI KECAMATAN CIAWI  
KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Naufal Ramadhan Fadhillah

022118206

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**BOGOR**

**2024**



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DESA BANJARWANGI KECAMATAN CIAWI  
KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D.)



Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,  
CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DESA BANJARWANGI KECAMATAN CIAWI  
KABUPATEN BOGOR**

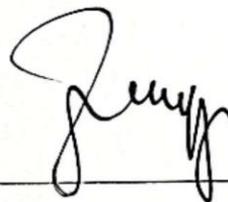
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Rabu, 26 Juni 2024

Naufal Ramadhan Fadhillah  
022118206

Disetujui

Ketua Penguji Sidang  
(Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., CSA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M.,  
M.Ak., CFE, CFA, CA, QIA., ASEAN CPA,  
CGCAE, CIAE, CGRE, FRMP, CREL.)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Amelia Rahmi, S.E., M.Ak., AWP.)



---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufal Ramadhan Fadhillah

NPM : 0221 18 206

Judul Skripsi : PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI DESA BANJARWANGI KECAMATAN CIAWI  
KABUPATEN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan,

Bogor, September 2024



0221 18 206  
Naufal Ramadhan Fadhillah

## **HAK CIPTA**

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**

### **Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah,, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

NAUFAL RAMADHAN FADHILLAH, 022118206, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Di bawah bimbingan : ERNADHI SUDARMANTO dan AMELIA RAHMI. 2024

Dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa dan dikirim melalui APBD (Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah) kabupaten/kota yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan seperti pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemmerintah, dan pelaksanaan pembangunan. Dana dukungan atau stimulus yang dikenal sebagai Dana Desa (DD) diberikan untuk membantu membiayai program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui apakah Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara partial terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. (2) Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara partial terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. (3) Untuk mengetahui apakah Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarwangi berbasis dengan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Informasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dalam Pengelolaan secara partial tidak berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa tidak berpengaruh secara partial terhadap Pemberdayaan Masyarakat serta Transparansi dan Akuntabilitas tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

**Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pemberdayaan Masyarakat**

## PRAKATA

Alhamdulillahirobbilalamin puji serta syukur penulis panjatkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal studi ini. Adapun penelitian yang penulis jadikan topik pembahasan yaitu **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKA DI DESA BANJARWANGI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR”**, penulisan dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak dan motivasi dari orang-orang terdekat akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan proposal studi ini. Sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sejumlah-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Edis Sontani dan Ibu Ai Jaajah, serta Kakak Arif dan Adik Rizqi saya yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta masukan-masukan kepada penulis.
3. Keluarga besar Bapak Dedi, Bapak Yaya dan Ibu Nani (Keluarga Ayah), keluarga besar Ibu Nurmi (Keluarga Ibu), seluruh saudara, sepupu dan keponakan yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
5. Bapak Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak., CSA. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Ibu Enok Rusmanah, S.E., M.Acc. Selaku Wali Dosen penulis.
9. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
10. Bapak Dr. Ernadhi Sudarmantho, Ak., M.M., M.Ak., CFE, CFrA., CA., QIA., ASEAN CPA, CGCAE, CIAE, CGRE, FRMP, CREL. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu penulis, memberikan motivasi, saran, serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Amelia Rahmi, SE., M.Ak., AWP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini
12. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
13. Sahabat-sahabat saya selama kuliah, Dimas Hari Dewanto, Atika Yunia Nuraeli Prasetya, Syafiro Putri, Faishal Ihsanudin, Deny Heriansyah Hermawan, Yuditia Virgiansyah, Dicky Maulana Hadi Tamma yang telah menjadi sahabat baik senang maupun susah, serta selalu memberikan masukan, saran, kritik, doa, dan semangat

kepada penulis.

14. Sahabat-sahabat lain saya, Agum Kurnia Budiyanto, Gery Heriansyah, dan Agi Fajar Cahyani yang selalu membantu saya dalam kondisi apapun, selalu memberikan masukan, saran, kritik, doa, dan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman kelas B Akuntansi 2018. Terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis, penuh cerita, tawa, canda, sedih, dan drama yang akan menjadi kisah yang menarik untuk diceritakan kembali di kemudian hari. Semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang sukses dalam hal apapun.
16. Teman-teman alumni SDN Papandayan 1, yang masih berhubungan baik hingga sekarang, Alisha Ratna Kamilla, Novi Berliana Hartono, Nurul Jasmin Wildan, Adi Abdillah, Mochammad Rizky Adhirajasa, dan Prasetya Nur Adi Kusumo.
17. Teman-teman alumni SMA saya, Figo, Zaimia dan Nabila yang selalu membantu dalam pengerjaan skripsi ini
18. Seluruh teman-teman dan sahabat yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk mengeluarkan keluh kesah, berbagi kisah, cerita dan pendapat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
19. Teman-teman Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan 2018, Kakak tingkat, dan Alumni yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
20. Almamater

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Sebab itu, besar harapan penulis untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Bogor, 15 November 2022

Naufal Ramadhan Fadhillah

Penulis

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	IX
BAB I.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	16
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	16
1.2.2 Perumusan Masalah .....	16
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	16
1.3.1 Maksud penelitian.....	16
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	17
1.4 Kegunaan Penelitian .....	17
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	17
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	17
BAB II .....	17
2.1 Pengertian Desa .....	18
2.2 Dana Desa.....	18
2.2.1 Pengertian Dana Desa .....	18
2.2.2 Tujuan Dana Desa.....	19
2.2.3 Karakteristik Good Governance untuk Pengelolaan Dana Desa .....	19
2.3 Transparansi .....	20
2.3.1 Pengertian Transparansi.....	20
2.3.2 Manfaat Transparansi.....	21
2.3.3 Karakteristik Transparansi .....	22
2.3.4 Indikator Transparansi .....	22
2.4 Akuntabilitas.....	23
2.4.1 Pengertian Akuntabilitas .....	23

2.5	Indikator Akuntabilitas .....	23
2.6	Pemberdayaan Masyarakat .....	24
2.6.1	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	24
2.6.2	Prinsip Pemberdayaan Masyarakat .....	25
2.7	Indikator Pemberdayaan Masyarakat .....	26
2.8	Penelitian Terdahulu dan Kerangka Penelitian .....	26
2.8.1	Penelitian Terdahulu .....	29
2.8.2	Kerangka Pemikiran .....	26
2.9	Hipotesis Penelitian .....	29
BAB III .....		34
3.1	Jenis Penelitian .....	35
3.2	Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian .....	35
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	35
3.4	Operasional Variabel .....	36
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	37
3.5.1	Populasi .....	37
3.5.2	Sampel .....	38
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	38
3.7	Metode Pengolahan Data / Analisis Data .....	39
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	39
3.7.2	Validitas dan Realibilitas .....	39
3.7.3	Metode Pengolahan Data .....	40
3.7.4	Uji Asumsi Klasik .....	41
3.7.5	Analisis Regresi Linear Berganda .....	42
3.7.6	Uji Hipotesis .....	43
BAB IV .....		45

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1	Gambaran Umum Desa Banjarwangi .....	45
4.1.2	Visi dan Misi Desa Banjarwangi .....	45
4.1.3	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banjarwangi.....	46
4.2	Deskriptif Data Penelitian .....	46
4.2.1	Transparansi.....	48
4.2.2	Akuntabilitas .....	49
4.2.3	Pemberdayaan Masyarakat .....	50
4.2.4	Analisis Statistik Deskriptif .....	50
4.2.5	Hasil Uji Intrumen Penelitian .....	50
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	53
4.4	Analisis Regresi Linear Berganda .....	57
4.5	Uji Hipotesis .....	58
4.6	Pembahasan Hasil Analisis Data .....	61
	4.6.1 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor .....	61
BAB V .....		62
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Inforgrafik APBDes 2023 .....	15
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar 4. 1 Grafik Uji Normalitas Data Histogram dan Data Probability Plot Sumber: .....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	36
Tabel 3. 2 Skala Likert.....	40
Tabel 3. 3 Tafsiran Nilai Rata-rata .....	41
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi.....	46
Tabel 4. 2 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisisioner .....	47
Tabel 4. 3 Tabel Skor Rataan Transparansi .....	48
Tabel 4. 4 Tabel Skor Rataan Akuntabilitas .....	49
Tabel 4. 5 Tabel Skor Rataan Pemberdayaan Masyarakat .....	50
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Transparansi .....	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas.....	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat .....	52
Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas .....	52
Tabel 4. 11 Hasil Output Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov .....	54
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4. 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	57
Tabel 4. 14 Analisis Regresi Linear Berganda .....	57
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	58
Tabel 4. 16 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	59
Tabel 4. 17 Hasil Uji Statistik t.....	60

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Desa, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak desa sebagai kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai wilayah geografis tertentu. Desa-desa ini mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan daerah, menjaga kepentingan masyarakat setempat, dan pada awalnya melaksanakan hak-hak tradisional. Desa mempunyai peranan penting dalam penyediaan layanan publik, karena desa merupakan lembaga pemerintah yang secara aktif berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan mengadvokasi kepentingan mereka. Pengelolaan uang dan aset desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang khusus mengatur tentang pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hak dan tanggung jawab desa dinilai berdasarkan nilai uang atau bentuk kompensasi lainnya, sesuai dengan peraturan keuangan desa. Aturan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan kas dan aset yang efektif terkait pelaksanaan kewajiban dan hak desa bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan penerapan strategi penganggaran yang metodis (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Dalam pemerintahan Indonesia, desa berfungsi sebagai tingkat dasar. Pentingnya tujuan, fungsi, dan kontribusinya tidak dapat dilebih-lebihkan. Sebagian besar penduduk kita tinggal di daerah pedesaan, dan beberapa tantangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bergantung pada institusi lokal. Desa adalah penerima utama komunikasi dari entitas negara bagian dan federal. Untuk mendapatkan ukuran yang akurat mengenai kekayaan, peringkat, dan harga diri suatu negara, penting untuk fokus mempelajari desa, seperti yang diungkapkan Wahyuddin (2016 dalam Dewi dkk., 2019).

Dana desa adalah uang yang dialokasikan kepada daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dana tersebut dialokasikan untuk menunjang kegiatan seperti pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan. Dana desa diciptakan oleh negara untuk secara formal mengakui dan memberdayakan entitas masyarakat lokal yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat, menjaga kepentingan masyarakat, dan menjunjung tinggi hak-hak tradisional atau adat. Selain itu, unit-unit ini memiliki kapasitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dalam masyarakat.

Penerapan otonomi di desa akan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengatur wilayahnya sendiri, sehingga meningkatkan besarnya kewajiban dan tugas dalam masyarakat. Namun, akuntabilitas merupakan elemen penting dari pemerintahan yang efisien. Salah satu unsur akuntabilitas fiskal di desa adalah pengawasan dana masyarakat. Mayoritas kota-kota pedesaan di kawasan ini mengalami dampak keterbatasan keuangan. Contoh APBDes adalah gabungan pendapatan dan belanja.

Memenuhi kebutuhan akan tata kelola yang efektif di masyarakat akan menghasilkan peningkatan kinerja, karena hal ini melibatkan penggunaan manajemen pembangunan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem manajemen pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan merupakan prinsip dasar yang menjadi dasar tata kelola yang efektif. Akuntabilitas adalah fondasi pemerintahan yang baik.

Memastikan tata kelola yang baik merupakan tujuan tambahan dari aspek akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa. Memastikan transparansi dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang semua tindakan dan hasilnya sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan aspek penting dari akuntabilitas. Aspek penting dalam pengelolaan uang desa adalah perlunya tata kelola yang bertanggung jawab dan efisien, yang tidak boleh diabaikan. Tingkat transparansi menjadi penentu penting profesionalisme penyelenggara (Dilago, 2018). Peningkatan transparansi lebih diinginkan.

Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan elemen penting dalam tata kelola yang efektif dalam penyelenggaraan keuangan desa (Ultfiah, 2017). Dengan menugaskan tugas pengelolaan sumber daya publik kepada mereka yang diberi mandat atau mempunyai kepentingan, hal ini menjamin bahwa pemerintah desa berperilaku etis dan mematuhi hukum yang berlaku. Akuntabilitas publik adalah tindakan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait tentang tindakan dan hasil pemerintahan. Masyarakat mendapat manfaat ketika organisasi sektor publik bersikap transparan dan terbuka mengenai kegiatan, proyek, kebijakan, dan penggunaan sumber daya mereka di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Ketaatan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencapai penganggaran publik yang efektif dan efisien.

Hak masyarakat untuk mengetahui secara utuh dan terbuka tentang pengelolaan sumber daya yang dititipkan serta kepatuhan terhadap hukum (PP Pasal 25 Edisi 71 Tahun 2010) mengharuskan adanya penyediaan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat, demikian disampaikan Putri. dkk. (2021). Transparansi dalam pengelolaan uang desa mempunyai pengaruh yang baik terhadap pembangunan desa, menurut studi ini.

Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat maka pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan sumber daya manusia yang akan menggugah masyarakat untuk inovatif dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan perekonomian desa.

Sebagaimana dikemukakan Sumaryadi (2005) dalam Putri dkk. (2021), tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membantu masyarakat yang kurang beruntung dan lemah secara ekonomi mencapai pembangunan manusia yang sejati dan inklusif dengan memberikan mereka alat yang mereka perlukan untuk menjadi mandiri dan memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka.

Dana dukungan atau stimulus yang dikenal dengan Dana Desa (DD) diberikan untuk membantu membiayai program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Program-program ini mengandalkan keterlibatan sukarela masyarakat untuk melaksanakan operasional desa, mengatur desa, dan membangun komunitas desa yang lebih kuat. Terdapat sekitar 4.883 jiwa yang mendiami Desa Banjarwangi di Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari Kabupaten Ciawi. Hasilnya, masyarakat bisa mendapatkan sumber daya yang mereka perlukan untuk bertransformasi menjadi desa premium melalui program pembiayaan desa. Suatu pejabat pemerintah atau lembaga yang berwenang telah mengambil suatu pilihan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum, dan keputusan itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang penyaluran keuangan desa. UU 6 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 menguraikan kebijakan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, meningkatkan perekonomian desa, menutup kesenjangan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa melalui penggunaan dana desa. Hal ini akan membawa pada kesejahteraan yang lebih baik dan pembangunan desa yang lebih adil. sebagai area yang memerlukan perbaikan. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan fokus utama dalam pembangunan desa. Jalan desa menjadi salah satu contoh prioritas pembangunan, sedangkan pemberdayaan masyarakat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di desa.

Permasalahan yang ditemui peneliti di desa Banjarwangi yaitu mengenai infrastruktur seperti sarana transportasi jalan yang masih kurang memadai, masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet) dan masih kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam penggunaan teknologi yang menyebabkan terbatasnya informasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada papan informasi dan website desa yang pada dasarnya dilaksanakan untuk memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa meningkat. Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi memiliki papan informasi dan website desa. Namun, ini hanya sebatas formalitas serta informasi yang disajikan di website tersebut merupakan informasi lama. Untuk informasi mengenai rincian dana desa dan penggunaan dana desa untuk setiap penerimaan dari dana desa saat ini hanya menggunakan spanduk yang mana tidak dapat bertahan lama karena spanduk tersebut mudah rusak. Adapun transparansi dan akuntabilitas desa Banjarwangi dapat digambarkan dan dilihat dalam infografik tersebut.



Gambar 1. 1 Inforgrafik APBDes 2023

Sumber : Kantor Desa Banjarwangi

Pada tahun 2020 Dana Desa yang terealisasi sejumlah Rp 2.055.239.787,00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sejumlah Rp 3.069.552.338,00. dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sekitar Rp 3.160.361.227,00. Dana desa di Desa Banjarwangi digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gudang penyimpanan pupuk subsidi, pembangunan pabrik pengolahan nanas, pelatihan, gaji perangkat desa, pembelian perlengkapan kantor desa dan pembangunan jalan usaha tani. Masyarakat Desa Banjarwangi mungkin mengharapkan adanya peningkatan pendapatan akibat adanya pembangunan ini. Di sisi lain, relatif sedikit masyarakat yang menyadari perlunya menerapkan reformasi yang didukung oleh Dana Desa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi penyebab utama hal ini.

Hasil peneliti sebelumnya yang akan diambil dan dijadikan pedoman untuk studi ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i dkk (2018), Garung dkk (2020), Sukmawati dkk (2019), Putri dkk (2021) dan Erganda dkk (2021)

menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa dipengaruhi positif oleh Transparansi dan Akuntabilitas. Kurniati (2022) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat berdampak positif pada pemberian Dana Desa.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa keterbukaan dan tanggung jawab dalam penanganan uang desa dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat. Sebab itu, penulis tertarik dengan ide untuk meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa Desa Banjarwangi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Penulis menetapkan judul tersebut setelah mempertimbangkan hal-hal berikut **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor”**

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan informasi yang diberikan, sehingga dapat ditunjukkan permasalahan berikut:

1. Permasalahan yang ditemui peneliti di desa Banjarwangi yaitu mengenai infrastruktur seperti sarana transportasi jalan yang masih kurang memadai, masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet) dan masih kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam penggunaan teknologi yang menyebabkan terbatasnya informasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada papan informasi dan website desa yang pada dasarnya dilaksanakan untuk memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa meningkat.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian didasarkan pada uraian latar belakang:

1. Bagaimana pengaruh secara partial Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pengaruh secara partial Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud penelitian**

Di Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, studi ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh keterbukaan dan tanggung jawab dalam penanganan keuangan desa.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara partial terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara partial terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui apakah Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Harapan penerapan praktis dari studi ini adalah untuk mengetahui dampak keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dan untuk memperluas wawasan secara umum.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Dokumen ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti di masa depan yang tertarik untuk mengkaji topik pemberdayaan masyarakat melalui keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Desa**

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terikat secara teritorial dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan yang diprakarsai oleh masyarakat, hak asasi manusia atau hak tradisional, pengakuan dan penghormatan dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Republik Indonesia. Kepala Desa antara lain berwenang menangani dana dan aset desa. Sebab itu, seluruh pengelolaan keuangan berada di pundak masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui otonomi desa sebagai bagian dari struktur pemerintahannya. Delegasi dari tingkat federal atau regional diberikan kepada Kepala Desa melalui pemerintah desa untuk menangani urusan pemerintahan tertentu. Menurut Ruru dkk. (2017), alasan pengaturan desa antara lain mengedepankan keberagaman, partisipasi, otonomi nyata, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan apa yang diungkapkan Boseke pada tahun 2020. Desa, unit masyarakat hukum terkecil yang pernah ada, telah berkembang seiring dengan peradaban Indonesia dan kini menjadi bagian integral dari kehidupan bernegara. Dalam hal interaksi langsung dengan masyarakat, desa berperan sebagai garda depan administratif. Berkembangnya sebuah desa merupakan cerminan dari kesejahteraan wilayah disekitarnya, dan hal ini mempunyai dampak yang luas bagi seluruh negara Indonesia.

#### **2.2 Dana Desa**

##### **2.2.1 Pengertian Dana Desa**

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, dana desa ditransfer dari APBN (Anggaran Belanja dan Belanja Negara) ke APBD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dana desa dibentuk sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengawasi dan mengendalikan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan hak adat atau hak asasi manusia. Unit-unit ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan yang adil di desa.

Menurut Boseke (2020) Dana Desa (DD) bertujuan untuk secara langsung dan tidak langsung meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian masalah di tingkat-tingkat desa. Permasalahan desa dan komunitasnya sangat spesifik tidak dapat di terapkan pada semua desa.

Menjalankan operasional secara swakelola dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan sumber daya mentah dari desa merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa yang melibatkan masyarakat. Agar dana yang diperuntukkan bagi pembangunan tidak keluar dari desa, pendekatan tata kelola mandiri ini menjadikan dusun sebagai pemimpin dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Keterlibatan pekerja lokal dipandang sebagai cara untuk merekrut pekerja dan membagi uang di antara mereka yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Pada saat yang sama, masyarakat di wilayah tersebut yang memiliki akses terhadap sumber daya mentah berharap kerja keras mereka akan membuahkan hasil.

### **2.2.2 Tujuan Dana Desa**

Pembangunan masyarakat merupakan tujuan pertama anggaran desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup dengan memenuhi kebutuhan mendasar melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal.

Pada awal pembentukannya, anggaran dana desa memprioritaskan pembangunan layanan dan infrastruktur daerah, termasuk jalan, pusat kesehatan, dan proyek serupa lainnya. Namun, setelah tujuan tersebut tercapai, pemerintah kini lebih fokus pada pendanaan desa dengan tujuan memberdayakan masyarakat dengan memberikan fasilitas untuk mengembangkan potensi diri masyarakat dan potensi dari desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tujuan Dana Desa adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik desa
2. Menghentikan kemiskinan
3. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
4. Memajukan perekonomian desa
5. Menguatkan subjek dan objek pembangunan untuk masyarakat desa.

### **2.2.3 Karakteristik Good Governance untuk Pengelolaan Dana Desa**

Sistem tata kelola yang baik adalah sistem yang mengikuti prinsip demokrasi dan berbasis pasar, mengelola dana pembangunan secara bertanggung jawab, mencegah korupsi di semua tingkat pemerintahan, menjaga pengeluaran tetap terkendali, dan memberikan landasan bagi dunia usaha untuk berkembang secara legal dan sosial (Mardiasmo, 2018).

Menurut Mardiasmo (2018), tata kelola yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang dapat

- menyalurkan ambisi mereka adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang partisipasi. Kebebasan berserikat, berekspresi, dan keterlibatan konstruktif merupakan landasan yang mendasari keterlibatan ini.
2. Sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif disebut supremasi hukum.
  3. Jika masyarakat bebas mencari informasi, maka akan terjadi transparansi. Mereka yang membutuhkan bisa segera mendapatkan informasi mengenai apa yang menjadi kepentingan umum.
  4. Pelayanan yang cepat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan sangat penting bagi lembaga publik.
  5. Tujuan mencapai konsensus adalah untuk melindungi kebaikan bersama.
  6. Dalam masyarakat yang berkeadilan, setiap kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan dan mendapatkan perlakuan yang adil.
  7. Administrasi sumber daya publik yang efisien dan efektif adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang efisiensi.
  8. Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kewajiban melaporkan perbuatan seseorang kepada masyarakat.
  9. Memiliki perspektif jangka panjang sangat penting bagi pejabat pemerintah dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan strategis.

Prinsip partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas merupakan landasan dari sembilan prinsip tata kelola yang baik. Jumlah elemen atau pilar tata kelola yang baik sangat bervariasi antar industri dan antara satu kelompok ahli dengan kelompok ahli lainnya. Meskipun demikian, menurut Sedarmayanti (2009), tata kelola yang efektif didasarkan pada sejumlah konsep, yang terpenting adalah keterbukaan, keterlibatan, dan akuntabilitas. Tata kelola yang baik terwujud dalam suatu organisasi ketika pemerintah telah memberikan informasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang seluruh kegiatan pengelolaan, dan kemudian terbuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan.

## **2.3 Transparansi**

### **2.3.1 Pengertian Transparansi**

Tata kelola yang baik memerlukan transparansi, tegas Hari Sabarno (2017). Pemenuhan indikator tambahan tersebut mungkin dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang pada gilirannya memerlukan transparansi dan kemudahan akses. Apabila informasi disajikan (dipublikasikan) secara tepat waktu, tentu akan lebih berguna dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik yang terbaik bersama pemerintah, khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah (Ritonga dan Syahrir, 2016). Namun, transparansi tidak berhenti pada penyediaan informasi yang dapat diakses oleh publik.

Untuk mencapai tata kelola yang efektif, transparansi didefinisikan

sebagai penyediaan informasi yang relevan kepada publik dengan cara yang dapat diakses dan dipahami (Toni dan Nur, 2019).

Transparansi organisasi dapat dipahami dalam tiga cara: pertama, sebagai tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; kedua, sebagai strategi atau akuntabilitas yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan lingkungan sekitar; dan ketiga, sebagai tindakan proaktif yang merupakan bagian integral dari kolaborasi. dalam konteks pemangku kepentingan dan manajemen. Sumbernya adalah Lopez dan Torres, 2017.

Tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya dan hasil yang dicapai mungkin dapat dipahami dengan lebih baik dalam lingkungan di mana informasi keuangan yang transparan dan jujur tersedia (Erganda dkk, 2021).

Dalam hal kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas masyarakat, transparansi adalah kuncinya. Pemerintah harus mempunyai pemahaman yang baik sebelum mengambil keputusan penting yang berdampak pada banyak orang karena kini pemerintah mempunyai kekuasaan tersebut. Keterbukaan membuat kebohongan lebih sulit untuk disembunyikan. Sebab itu, keterbukaan menjadi alat penting untuk melindungi uang masyarakat dari ketidakjujuran.

### **2.3.2 Manfaat Transparansi**

Seso dan Lestari (2020) menyatakan bahwa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari transparansi pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Siapapun dapat melihat siapa yang bertugas melaksanakan dan mengelola pelayanan publik.
2. Biaya pelayanan dapat lebih dipahami oleh masyarakat ketika mereka mengetahui kebutuhan teknis dan administratifnya.
3. Orang yang bertugas memberikan pelayanan dan menangani keluhan pelanggan disebut pejabat.
4. Pastikan Anda berkomunikasi dengan baik saat melakukan servis.
5. Kapasitas untuk memberikan pelayanan sekaligus mengubah ketidakpuasan pelanggan menjadi kegembiraan.
6. Standar pelayanan publik terbuka untuk umum dan berdasarkan kenyataan.
7. Lokasi dan fasilitas pelayanan harus sesuai, mudah diakses oleh masyarakat umum, dan mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudahan akses.
8. Disiplin, sopan, santun, suka menolong, dan memberikan pelayanan yang tulus adalah semua aspek dalam menjadi pemberi pelayanan yang baik.
9. Kejelasan, meliputi: kekhususan biaya atau tarif pelayanan pemerintah; proses, baik yang khusus maupun yang umum; dan proses administrasi dan teknis.
10. Publikasi dan media sosial, baik cetak, elektronik, gambar, dan sosialisasi langsung, diperlukan untuk menyebarkan informasi layanan kepada

masyarakat umum.

### **2.3.3 Karakteristik Transparansi**

Selalu berperilaku bebas dan jujur, menerima masukan dan kritik, dan bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri. Secara khusus, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sifat transparansi (Mardiasmo, 2018):

1. Kemampuan menginformasikan, dalam arti memberikan informasi yang faktual, jelas, dan benar kepada pemangku kepentingan serta berita, prosedur, statistik, fakta, dan penjelasan mengenai proses.
2. Pemangku kepentingan mempunyai hak untuk mengakses informasi, dan hak tersebut mencakup hak untuk mengetahui apa saja informasi tersebut. Dengan demikian, seluruh pihak terkait akan mempunyai akses yang lengkap dan benar terhadap seluruh data dan informasi.
3. Ada dua jenis pengungkapan: pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Yang pertama mencakup segala sesuatu yang telah dijadikan kewajiban oleh peraturan dan prosedur operasi standar badan pengawas. Di sisi lain, pengungkapan yang dilakukan secara sukarela melampaui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, aturan akuntansi, dan undang-undang dari badan pengawas.

### **2.3.4 Indikator Transparansi**

Karena dana tersebut bersifat publik dan merupakan hak milik seluruh masyarakat, penerapan transparansi ini mengharuskan pemerintah desa menangani dana tersebut secara terbuka dan transparan. Artinya, pemerintah desa dan pengelolanya mempunyai tanggung jawab untuk bersikap transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana tersebut. Masyarakat akan lebih percaya dan menghargai pemerintahan desa karena adanya transparansi ini.

Kristianten (2014) menyarankan metrik berikut sebagai ukuran potensi keterbukaan:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dengan menggunakan kriteria di atas, studi ini mengevaluasi keterbukaan dengan melihat:

- a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- b. Adanya akses informasi yang jelas serta transparansi tentang perencanaan, dan pelaksanaan.
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

## **2.4 Akuntabilitas**

### **2.4.1 Pengertian Akuntabilitas**

Kapasitas organisasi publik untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mereka yang berkepentingan dalam organisasi merupakan inti dari gagasan akuntabilitas, sebagaimana dinyatakan oleh Suharno (2020). Lebih tepatnya, akuntabilitas adalah kapasitas lembaga sektor publik untuk membenarkan tindakannya, khususnya terhadap partai politik yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menilai organisasi tersebut.

Istilah “akuntabilitas” diartikan oleh Rusdiana dan Nasihudin (2018) sebagai “kewajiban seorang individu atau organisasi untuk melaksanakan arahan atau kebijakan pihak lain”, baik kewenangan tersebut bersifat horizontal maupun vertikal.

Tugas wali amanat untuk menjelaskan, mewakili, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh operasi dan tindakan yang berada dalam lingkup pemberi amanah, beserta hak dan yurisdiksinya atas kewajiban tersebut, diuraikan oleh Setiana dan Yuliani (2017).

Kemudian menurut Musyidi (2013) akuntabilitas publik mengacu pada pada pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik, dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara bertahap.

Suatu pihak bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ketika pemangku kepentingan mempercayakan kewajiban ini kepada mereka. Tujuan dari menjaga akuntabilitas aparat desa dalam membelanjakan anggarannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya secara efektif sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan bernilai.

Efektivitas pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban dan kegiatannya dapat dinilai dengan menggunakan akuntabilitas ini. Akuntabilitas mengukur efektivitas suatu organisasi dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan tersebut mencakup pengelolaan sumber daya yang dialokasikan, penyelesaian proyek tertentu, atau penegakan peraturan lainnya. Masyarakat akan dapat mengamati dan mengatur segala jenis penyalahgunaan kekuasaan setelah kewajiban ini dipenuhi.

## **2.5 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Ardiyanti (2019), Indikator untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Ketercapaian tujuan pengelolaan Dana Desa
2. Keterlibatan pemerintah Desa
3. Pengawasan tim pelaksana

#### 4. Laporan pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di ukur dengan menggunakan:

1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
2. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana
4. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

## 2.6 Pemberdayaan Masyarakat

### 2.6.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chatarina Rusmiyati pada tahun 2011 dan dikutip oleh Tahir pada tahun 2018, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan individu, kelompok, atau komunitas untuk mengambil peran aktif dalam membentuk kehidupan mereka sendiri dan lembaga-lembaga yang mempengaruhi mereka.

Demi mencapai kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan—individu, kelompok, dan institusi—pemberdayaan masyarakat mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran kolektif yang partisipatif. pertumbuhan berkelanjutan, pemberdayaan, kemandirian, dan partisipasi (Mardikanto, 2017).

Pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada: mendorong lebih banyak inisiatif dan kemandirian masyarakat; pembenahan perumahan dan lingkungan sekitar; pembentukan badan usaha ekonomi dan lembaga keuangan di desa; dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghasilkan output yang lebih banyak (Aris, 2018 dalam Wardani et al., 2020).

Salah satu cara konsultasi pembangunan bertujuan untuk mencapai tujuannya adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian integral dari tujuan tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pembentukan dan pengubahan tindakan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Untuk membantu masyarakat memahami tantangan yang akan mereka hadapi, menyadari potensi mereka dan desanya, serta merancang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, pemberdayaan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan terjadinya pembangunan desa yang lebih berkeadilan dan inklusif (Ajeng Dini Utami, 2019:23).

Melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sejalan dengan inti permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah menumbuhkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya.

Inti dari pemberdayaan masyarakat desa adalah memberikan sarana kepada masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta ketahanannya dalam berbagai bidang kehidupan agar dapat berdiri sendiri. Kemampuan untuk mengejar kepentingan sendiri, membangun infrastruktur sendiri, mengelola sumber daya sendiri, dan menemukan solusi sendiri terhadap berbagai permasalahan merupakan ciri-ciri masyarakat mandiri. Menurut Cholisin (2011) yang dikutip dalam Adam dan Nimasari (2018), hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terlibat aktif dalam pertumbuhan dan pemerintahan desa.

Pemahaman ini membawa kita pada kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah gerakan untuk mengangkat masyarakat yang belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan yang ada saat ini. Dengan kata lain, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.6.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat mencakup pemberian bantuan, kesiapsiagaan, dan keamanan. Peradaban yang berteknologi canggih menyediakan kebutuhan dasar anggotanya, memproduksi barang, dan memperoleh imbalan finansial atas upayanya. Prinsip-prinsip pemberdayaan harus diikuti oleh para agen pemberdayaan ketika mereka melakukan inisiatif pemberdayaan.

Berikut ini prinsip – prinsip pemberdayaan (Ajeng Dini Utami, 2019) :

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, bakat, masalah, minat, dan potensi yang berbeda – beda. Unsur – unsur yang bersifat pemaksaan harus dihindari karena pemaksaan bukan ciri dari pemberdayaan.
2. Tujuan, tantangan, dan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan merupakan landasan dalam setiap upaya pemberdayaan. Pada intinya, setiap individu mempunyai potensi dan keinginan yang melekat. Langkah pertama dalam memberdayakan seseorang adalah membantu mereka menyadari nilai mereka sendiri dan sumber daya yang mereka perlukan untuk tumbuh menuju kemandirian. Proses pemberdayaan harus difokuskan pada kebutuhan calon sasaran. Hal ini biasa terjadi di daerah pedesaan di mana masyarakatnya masih hidup di masa lalu dan menolak ide, perspektif, kebutuhan, tantangan, dan peluang baru. Pengamatan yang menyeluruh dan akurat sangat penting untuk mencapai pemberdayaan. Dalam situasi seperti ini, agen pemberdayaan harus mampu memahami kemampuan dan kebutuhan penerimanya.

3. Individu atau kelompok yang menjadi fokus upaya pemberdayaan disebut sasaran pemberdayaan. Tujuan, metode, dan format kegiatan pemberdayaan didefinisikan sesuai dengan tujuannya.
4. Memulihkan nilai-nilai, budaya, dan pengetahuan lokal yang bermakna merupakan bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat. Identitas masyarakat dibangun berdasarkan budaya dan pengetahuan lokalnya, yang harus diberdayakan dalam berbagai cara untuk mendorong pertumbuhannya sebagai modal sosial. Hal ini mencakup praktik-praktik seperti kolaborasi timbal balik, pembangunan konsensus melalui diskusi, dan kearifan lokal.

## **2.7 Indikator Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator pemberdayaan dapat dipandang sebagai instrumen untuk menilai kondisi permasalahan yang dihadapi, sebagaimana dikemukakan Soeharto (2005) dalam Tahir (2018). Kompetensi dalam bidang opini publik, analisis sosiopolitik, dan tindakan partisipatif merupakan tiga pilar yang membentuk pemberdayaan.

Penting untuk memahami beberapa indikator pemberdayaan yang dapat mengungkapkan apakah seseorang diberdayakan atau tidak agar dapat memahami penekanan operasional dan tujuan pemberdayaan. Hasilnya, inisiatif pemberdayaan masyarakat mungkin tidak fokus pada bidang perubahan tertentu yang paling memerlukan perhatian. Pemberdayaan ekonomi, akses manfaat kesejahteraan, pemberdayaan budaya dan politik, serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya merupakan indikator keberhasilan upaya pemberdayaan. Kekuasaan di dalam, kekuasaan untuk, kekuasaan atas, dan kekuasaan dengan adalah empat dimensi kekuasaan yang terkait dengan ketiga karakteristik tersebut.

Berikut indikator penilaian pemberdayaan masyarakat menurut Tahir (2018):

1. Kemampuan
2. Kepercayaan
3. Wewenang
4. Tanggungjawab.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka pemberdayaan masyarakat di ukur dengan menggunakan:

1. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan berbagai teknologi.
2. Kepercayaan masyarakat dalam program Dana Desa.
3. Wewenang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
4. Masyarakat diberikan Tanggung jawab mengenai pengelolaan Dana Desa.

## **2.8 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Penelitian**

### **2.8.1 Kerangka Pemikiran**

Pemberdayaan Masyarakat dan Dampak Akuntabilitas dan Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa:

1. Pengaruh Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap

## Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu definisi transparansi yang ditawarkan oleh Mahmudi (2016) adalah kesediaan suatu organisasi untuk bersikap terbuka dan jujur kepada pemangku kepentingan mengenai informasi yang dimilikinya mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publiknya. Instansi pemerintah harus terbuka dan jujur mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang mereka buat, sedang terapkan, atau rencanakan untuk mereka terapkan, serta sumber daya yang akan mereka gunakan. Jika dana desa yang digunakan untuk proyek pemberdayaan masyarakat dikelola secara transparan, pihak berwenang akan lebih mudah mengawasi prosesnya, dan dana tersebut akan dibelanjakan dengan sukses dan tepat sasaran.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri et al. (2021) dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Studi ini menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh transparansi.

### 2. Pengaruh Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, entitas bertanggung jawab dalam mengelola sumber dayanya dan melaksanakan kebijakan yang telah didelegasikan kepadanya (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas vertikal dan horizontal adalah dua kategori tanggung jawab utama. Dalam peran gandanya sebagai pengelola dan pengelola dana desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat penerima manfaat dana desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya. Tujuan pemanfaatan uang desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat. Sebab itu, penting untuk menciptakan tanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut penelitian Rina Indrawati Syafi'i dkk. (2018) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”, hal ini sejalan dengan temuan bahwa variabel akuntabilitas memang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. . menuju pemberdayaan masyarakat.

### 3. Pengaruh Transparansi, dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Lubis (2016) berpendapat bahwa selain melindungi rahasia individu, kolektif, dan negara, organisasi harus transparan dalam berhubungan dengan publik sehingga setiap orang memiliki akses terhadap informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang cara organisasi dijalankan. Keterbukaan ini memastikan bahwa pengurus desa menangani keuangan masyarakat sesuai dengan semua standar hukum dan etika yang relevan dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh masyarakat. Sederhananya, keterbukaan ini dilakukan agar

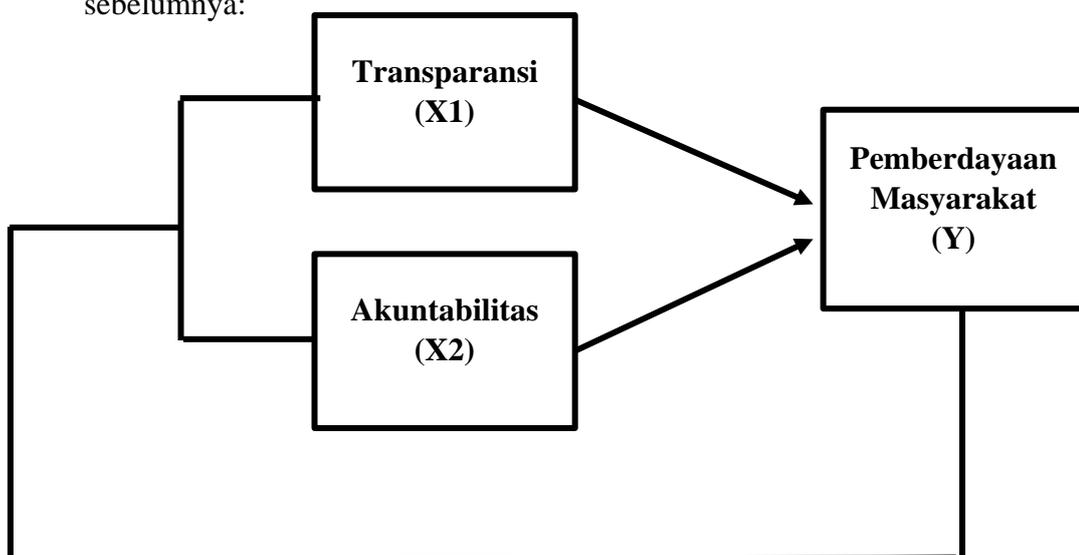
masyarakat mempunyai jawaban dan meminta pertanggungjawaban penguasa atas program dan kebijakan yang telah atau sedang dijalankan, serta sumber daya yang telah dicurahkan untuk itu.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, entitas bertanggung jawab dalam mengelola sumber dayanya dan melaksanakan kebijakan yang telah didelegasikan kepadanya (Mardiasmo, 2018). Para pemangku kepentingan mengharapkan orang-orang yang mereka percayai untuk melakukan apa yang diminta dari mereka, dan jika mereka gagal melakukan hal tersebut, hal ini akan berdampak buruk pada organisasi secara keseluruhan dan kredibilitas para pemimpinnya. Untuk memastikan bahwa pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan kemampuan terbaiknya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, penting bagi mereka untuk bertanggung jawab atas penggunaan keuangan daerah. Dengan kata lain, akuntabilitas adalah mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan seseorang dan memastikan bahwa masyarakat, atau komunitas dalam hal ini, mendapat informasi.

Karena dana yang dikelola adalah uang masyarakat, maka akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang penting. Sayangnya, tidak semua desa telah mengambil langkah-langkah ini, dan belum ada inisiatif lebih lanjut untuk mendorong keterbukaan dan tanggung jawab keuangan dalam masyarakat.

Temuan Matia Andriani (2019) bahwa akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana desa mempunyai dampak gabungan terhadap pemberdayaan masyarakat menguatkan hal tersebut.

Berikut rangkuman hipotesis penelitian berdasarkan informasi yang diberikan di atas, sehingga memungkinkan seseorang dapat menyusun konstelasi penelitian yang menjelaskan variabel-variabel yang disebutkan sebelumnya:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

## 2.8.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani, 2019 & Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Garut	Variabel Independen: - Transparansi - Akuntabilitas  Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan	X: - Pertanggung Jawaban - Keterbukaan  Y: - Akuntabilitas  Transparansi	Metode Survei	Studi ini tidak menemukan hubungan antara keterbukaan dan perbaikan pengelolaan fiskal pada 30 pemerintahan desa di Kabupaten Garut. Tiga puluh Pemerintah Desa di Kabupaten Garut menggunakan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskalnya. 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut sangat terdampak dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
2.	Garung, Christa Yunita, dkk., 2020 & Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap	Variabel Independen: - Transparansi - Akuntabilitas  Variabel Dependen: Pengelolaan Alokasi Dana Desa	X: - Pertanggung jawaban - Keterbukaan  Y: - Akuntabilitas - Transparansi Partisipatif	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpul	Terkait tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Manule, Kabupaten Sasitamean Malaka, sebagian akuntabilitas dan

	<p>pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pencapaian Good Governance pada Desa Manula, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka</p>			<p>an data Observasi</p>	<p>transparansi mempunyai peran yang besar, namun jika keduanya hadir, keduanya akan membawa perbedaan besar dalam cara pengelolaan dana desa.</p>
<p>3.</p>	<p>Ade Ayu Anggreni Putri,dkk , 2021 &amp; Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Transparansi</li> <li>- Partisipasi Masyarakat</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>X1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa</li> <li>- Adanya ikut serta perangkat desa dalam pengelolaan dana desa</li> <li>- Adanya monitoring pelaksanaan</li> <li>- Adanya penyusunan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa</li> </ul> <p>X2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian akses informasi yang akurat mengenai proses perencanaan</li> <li>- Tahapan Pelaksanaan dan</li> </ul>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif</p>	<p>Studi ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan tingkat pemberdayaan masyarakat di Desa Songan B.</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh keterbukaan</p>

			<p>pertanggung jawaban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakannya musyawarah dengan masyarakat</li> <li>- Keterbukaan dalam seluruh proses pengelolaan dan informasi mengenai proses serta hasil pengelolaan keuangan desa</li> </ul> <p>X3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan</li> <li>- Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan</li> <li>- Keterlibatan masyarakat dalam</li> </ul> <p>Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan</li> <li>- Kepercayaan</li> <li>- Wewenang Tanggung jawab.</li> </ul>		<p>dalam pengelolaan dana desa. Terdapat korelasi yang baik dan substansial antara keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan pemberdayaan masyarakat.</p>
4.	Erni Tahir, 2018 & Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi Dana Desa</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan</li> </ul>	<p>X1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Partisipatif</li> </ul> <p>Y1:</p>	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif	Berdasarkan temuan tersebut, terlihat jelas bahwa Alokasi Dana Desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat

	Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)	Masyarakat Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan</li> <li>- Kepercayaan</li> <li>- Wewenang</li> <li>- Tanggung jawaban</li> </ul> <p>Y2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan Sosial</li> <li>- Keadilan Ekonomi</li> </ul> <p>Keadilan Demokrasi</p>		dan memberdayakan masyarakat setempat.
5.	Indah Setiarini Erganda dkk, 2021, & Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Alokasi (Studi Pada 13 Desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> </ul> <p>Variabel Dependen: Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>X:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya keterbukaan</li> <li>- Keterlibatan</li> <li>- Kemudahan Akses masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah</li> </ul> <p>Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Penatanusahaan</li> <li>- Pertanggung jawaban keuangan desa</li> </ul>	Metode penelitian yang digunakan explanatory survey dengan pendekatan kuantitatif	Studi ini membantah hipotesis bahwa keterbukaan meningkatkan penganggaran desa. Pengelolaan keuangan di desa dipengaruhi oleh akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting

6	Rina Indrawati Syafii dkk., 2018 & Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa</li> <li>- Kebijakan Desa</li> <li>- Kelembagaan Desa</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>	<p>X1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Pelaksanaan</li> <li>- Penatausahaan, Pelaporan</li> <li>- Pertanggung jawaban Keuangan Desa</li> </ul> <p>X2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan desa secara struktur</li> </ul> <p>X3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musyawarah Desa</li> </ul> <p>Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan kemandirian masyarakat</li> </ul>	Metode kuantitatif	Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pengelolaan Alokasi Dana Desa, peraturan desa, dan kelembagaan desa, menurut studi ini.
7	Andriani Matia, 2019 & Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi</li> <li>- Akuntabilitas</li> <li>- Partisipasi Masyarakat</li> </ul> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Dana Desa</li> </ul>	<p>X1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbukaan informasi</li> </ul> <p>X2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya laporan pertanggungjawaban dan ketercapaian tujuan pengelolaan keuangan desa</li> </ul> <p>X3:</p>	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif asosiatif	Tranparansi, Akuntabilita, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan Masyarakat</li> </ul> <p>Y:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Pelaksanaan dan pertanggung jawaban</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

Penelitian sebelumnya oleh Garung dkk. dan penelitian saya sendiri membahas topik transparansi dan akuntabilitas; namun, variabel terikat dan teknik observasi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian saya.

Baik penelitian saya maupun penelitian Syafii dkk. telah mengkaji pemberdayaan masyarakat, meskipun penelitian kami berbeda-beda dalam hal variabel independen yang digunakan—kebijakan desa dan kelembagaan desa. Di sisi lain, kami memiliki ketertarikan yang sama terhadap topik ini.

Selain itu, penelitian saya dan penelitian Tahir Erni (2018) sebelumnya berbeda-beda dalam hal variabel independen yang digunakan, namun keduanya sebanding dalam pengujian pemberdayaan masyarakat, yang merupakan titik dimana persamaan berhenti dan perbedaan dimulai.

Penelitian yang dilakukan Putri dkk. dan temuan saya sendiri berbeda dalam satu hal dan serupa dalam hal lain. Di satu sisi, penelitian kami membahas akuntabilitas, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat; di sisi lain, penelitian kami berbeda karena menggunakan partisipasi masyarakat sebagai variabel independen.

## 2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah tebakan atau tanggapan yang berhasil terhadap topik penelitian (hubungan antara banyak variabel) yang harus divalidasi melalui data yang dikumpulkan.

**Hipotesis 1** : Transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi.

**Hipotesis 2** : Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi.

**Hipotesis 3** : Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Seorang peneliti harus menggunakan metodologi penelitian yang sesuai ketika melakukan penelitian. Peneliti akan dapat melihat gambaran besar tantangan dan cara mengatasinya jika hal ini dilakukan. Karena data numerik digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu hingga saat ini, maka studi ini dapat digolongkan sebagai penelitian berbasis deskriptif dan verifikatif dengan teknik pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian juga merupakan praktik umum untuk menentukan kebenaran hipotesis dan gagasan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang diteliti, strategi studi ini akan mengidentifikasi korelasi yang signifikan secara statistik antara variabel-variabel yang diteliti.

Sugiyono (2013) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci tentang satu atau beberapa variabel secara terpisah satu sama lain, tanpa menarik kesimpulan apa pun tentang hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk memverifikasi hipotesis yang diajukan, apa teknik verifikasinya menurut Sugiyono (2013).

Definisi di atas cukup memberikan latar belakang untuk memahami bahwa metode deskriptif verifikatif merupakan alat pengujian hipotesis statistik yang berupaya menggambarkan kebenaran fakta yang ada dan hubungan antar variabel yang diteliti melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor diteliti dengan menggunakan teknik deskriptif verifikatif untuk mengetahui bagaimana pengaruh keterbukaan dan tanggung jawab penanganan uang desa.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, Lokasi Penelitian**

Pengelolaan dana desa sebagai variabel independen dalam studi ini, dan pemberdayaan masyarakat sebagai variabel dependen. Tujuan penelitiannya adalah akuntabilitas dan transparansi.

Kajian ini akan menggunakan unit analisis sebagai berikut: perangkat dan staf desa, kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lokasi dari penelitian saya adalah Desa Banjarwangi di Kabupaten Bogor tepatnya di Jl. Balai Desa, Banjarwangi, Kecamatan Ciawi, Jawa Barat 16720.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Pemberdayaan masyarakat (variabel Y) dan keterbukaan dan akuntabilitas

(variabel X) dalam penyelenggaraan keuangan desa menjadi fokus pengumpulan dan analisis data studi ini. Informasi yang dikumpulkan untuk studi ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dalam hal ini Desa Banjarwangi, yang meliputi observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Sumber data yang melengkapi data utama disebut sumber data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh entitas lain selain item studi itu sendiri. Catatan pemerintahan Desa Banjarwangi di Kabupaten Ciawi dijadikan sebagai sumber data sekunder dalam studi ini. Hal-hal seperti peta daerah, laporan aktualisasi penyerapan dana desa, catatan data kependudukan, kerangka organisasi pemerintah, dan data numerik adalah contohnya.

### 3.4 Operasional Variabel

**Tabel 3. 1 Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dan Aksesibilitas dokumen.</li> <li>2. Kejelasan dan kelengkapan informasi</li> <li>3. Keterbukaan proses</li> <li>4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.</li> <li>2. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan.</li> <li>3. Keterbukaan proses pengelolaan.</li> <li>4. Keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.</li> </ol>	Ordinal
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketercapaian tujuan pengelolaan Dana Desa</li> <li>2. Keterlibatan Pemerintah Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan Dana Desa dalam satu tahun anggaran</li> <li>2. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam</li> </ol>	Ordinal

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengawasan tim pelaksana</li> <li>4. Laporan pengelolaan Dana Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengelolaan Dana Desa</li> <li>3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana</li> <li>4. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa</li> </ul>	
Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan</li> <li>2. Kepercayaan</li> <li>3. Wewenang</li> <li>4. Tanggung Jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan berbagai teknologi</li> <li>2. Kepercayaan masyarakat dalam program Dana Desa</li> <li>3. Wewenang masyarakat dalam menyampaikan aspirasi</li> <li>4. Masyarakat diberikan tanggung jawab mengenai pengelolaan Dana Desa</li> </ul>	Ordinal

Setiap item dari variabel Transparansi, Akuntabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner yang akan disebar akan dilengkapi dengan lima alternatif jawaban, dan masing-masing jawaban mengandung skor, yaitu:

STS	: Sangat Tidak Setuju	skor 1
TS	: Tidak Setuju	skor 2
N	: Netral	skor 3
S	: Setuju	skor 4
SS	: Sangat Setuju	skor 5

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Kumpulan entitas yang memiliki ciri-ciri yang sama dianggap sebagai populasi (Supomo, 2014). Khususnya dalam penelitian opini berbasis survei, kesulitan populasi muncul sebagai akibat dari pengumpulan data. Beberapa anggota staf kantor desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Bagian Kesra menjadi populasi yang dijadikan variabel dalam studi ini.

### 3.5.2 Sampel

Metode penarikan sampel terkategoriikan *probability random sampling* dengan menggunakan *simple random sampling*. Teknik pengambilan data tidak mempertimbangkan perbedaan, sehingga semua masyarakat yang menjadi target program dana desa di Banjarwangi berhak menjadi responden. Sampel dari penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus *slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

$n$  = ukuran sampel

$N$  = ukuran populasi

$e$  = persen kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10%)

$$n = \frac{4883}{1 + 4883(0,1)^2}$$

$$n = 98$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah responden yang akan diambil adalah sebanyak 98 orang. Namun peneliti akan membulatkan pengambilan sampel menjadi 100 orang.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang sistematis dan seragam digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan; ini disebut metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data harus relevan dengan permasalahan yang ada dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan informasi untuk studi ini meliputi:

1. Kuesioner

Salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari masyarakat adalah dengan menggunakan kuesioner, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan dengan tanggapan pilihan ganda.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan melihat makalah dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian perpustakaan, artikel di jurnal yang diterbitkan, dan bahan relevan lainnya juga digunakan untuk mengumpulkan kumpulan data untuk studi ini.

3. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dan

menganalisis data dari laporan keuangan lembaga (baik bulanan atau tahunan) merupakan komponen studi lapangan.

### **3.7 Metode Analisis Data / Pengolahan Data**

Dalam studi ini pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif karena data diukur secara kuantitatif; yaitu data dianalisis untuk memudahkan analisis data yang diukur. Para peneliti dalam studi ini menggunakan SPSS versi 25, sebuah program pengujian statistik, untuk menguji hipotesis mereka. Data dianalisis menggunakan proses langkah demi langkah yang meliputi statistik deskriptif, uji reliabilitas dan validitas, regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

#### **3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Daripada mencoba menarik kesimpulan luas dari data, statistik deskriptif hanya mendeskripsikan dan mengilustrasikan data dalam bentuk mentahnya (Sugiyono, 2013)

#### **3.7.2 Validitas dan Realibilitas**

##### **1. Uji Validitas**

Validitas suatu alat ukur memberikan bukti ketergantungannya. Validitas isi, yaitu kemampuan suatu instrumen untuk menilai isi (konsep) yang dimaksudkan, digunakan dalam studi ini untuk menjamin validitas. Artinya, substansi suatu gagasan atau variabel dapat diungkapkan dengan suatu alat ukur. Metode korelasi Product Moment Person dengan rumus sebagai berikut digunakan untuk melakukan uji validitas

$$r = \frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

- R = Jumlah koefisien korelasi
- N = Banyaknya responden dalam sampel x
- X = Variabel independen
- Y = Variabel independen

##### **2. Uji Reliabilitas**

Tujuan dari reliabilitas suatu metode pengolahan data adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran data. Reliabilitas suatu kuesioner dinilai berdasarkan konsistensi dan kestabilan jawaban responden

terhadap pernyataan atau pertanyaan yang dikandungnya. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengevaluasi suatu kuesioner yang mengukur suatu variabel atau gagasan. Untuk menilai reliabilitas kuesioner digunakan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{kr}{1 + (k - r)r}$$

Keterangan:

- $\alpha$  = Koefisien Cronbach's Alpha
- K = Jumlah item valid
- R = Rata-rata korelasi antar item
- 1 = Konstanta

Evaluasi ini menggunakan Cronbach's Alpha sebagai ukuran statistiknya. Koefisien Cronbach's Alpha yang lebih dari 0,6 sering dianggap sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk menentukan kepercayaan suatu instrumen penelitian. Ghazali (2013) menyatakan bahwa variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha-nya di atas 0,6.

### 3.7.3 Metode Pengolahan Data

Penilaian item terkait Pemberdayaan Masyarakat, Akuntabilitas, dan Transparansi akan dilakukan dengan menggunakan skala Likert:

**Tabel 3. 2 Skala Likert**

STS	: Sangat Tidak Setuju	skor 1
TS	: Tidak Setuju	skor 2
N	: Netral	skor 3
S	: Setuju	skor 4
SS	: Sangat Setuju	skor 5

Untuk mendapatkan jawaban agregat dari para peserta, kami menjumlahkan angka-angka yang diberikan untuk setiap pertanyaan dan membulatkannya ke bilangan bulat terdekat pada skala. Dengan menggunakan persamaan matematika ini:

$$\text{Variabel} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian}}{\text{Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item}} \times 100\%$$

Keadaan variabel dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-rata indeks variabel bebas dan variabel terikat setelah seluruh tanggapan dari partisipan diperoleh. Selanjutnya setiap kriteria diberi bobot, dan tanggapan peserta dikumpulkan ke dalamnya. Jumlah responden dibagi dengan hasil

perkalian semua kriteria. Untuk mendapatkan peringkat rata-rata mulai dari 1 hingga 5. Jajak pendapat menentukan opini individu dengan menghitung skor rata-rata mereka. Umar (2011) menguraikan langkah-langkah yang termasuk dalam teknik rata-rata sebagai berikut:

1. Susunlah jawaban survei dalam urutan menaik berdasarkan bobotnya.
2. Hitung skornya menggunakan rumus:  
Skor = (Frekuensi Jawaban x Bobot Skala)
3. Dengan mengkategorikan jawaban yang sebanding, kita dapat menentukan frekuensi setiap jenis balasan. Selanjutnya, kami akan menghubungkan setiap kelompok dengan skala dan menggabungkannya. Pada akhirnya, teknik-teknik ini memberikan skor.
4. Hitung skor rata-rata menggunakan rumus yang tersedia:
5. Nilai rata-rata skor =  $\frac{\text{Skor}}{\text{Jumlah responden}}$

Menerjemahkan rata-rata skor persepsi ke dalam ruang kriteria, rumus rentang kriteria adalah sebagai berikut:

$$RK = \frac{(m - n)}{k}$$

Keterangan :

- RK = Rentang kriteria
- M = Skala jawaban terbesar
- N = Skala jawaban terkecil
- K = Jumlah kelas

Dalam studi ini, nilai m yang akan dihitung rentang kriterianya adalah 5. Nilai n adalah 1 dan nilai k adalah 5. Berdasarkan data diatas, maka didapat rentang kriteria persepsi sebagai berikut:  $RK = (5-1) : 5 = 0,8$

**Tabel 3. 3 Tafsiran Nilai Rata-rata**

Interval	Kriteria
1,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Cukup
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono (2013)

### 3.7.4 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data yang dinilai. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk memastikan apakah variabel residu atau perancu dalam model regresi berdistribusi normal. Studi ini menggunakan analisis

grafis untuk melakukan uji normalitas.

Memeriksa grafik histogram yang menyandingkan data yang diamati dengan distribusi yang mendekati distribusi normal memungkinkan seseorang menilai residu secara visual dan memastikan kesesuaiannya dengan normalitas. Analisis statistik menggunakan sampel yang diperoleh melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan menganalisis nilai disparitas dan kepentingan, dapat diketahui apakah data tersebut berdistribusi normal. Ghozali (2013) mendefinisikan suatu model dikatakan normal jika tingkat signifikansinya lebih dari 5%.

## 2. Uji Multikolinieritas

Jika model regresi menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji multikolinieritas telah mencapai tujuannya. Tidak adanya korelasi antar variabel independen menunjukkan model regresi yang kuat. Periksa nilai toleransi dan variance inflasi faktor (VIF) untuk mengetahui apakah terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Perlu adanya nilai toleransi yang lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih rendah dari 10 (Ghozali, 2013).

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Ahli statistik menggunakan uji heteroskedastisitas untuk menilai apakah varian residu dua data berbeda. Melalui analisis titik-titik data pada Uji Glesjer dapat diketahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji Glejser dapat diperoleh dengan meregresi nilai absolut residu terhadap variabel independen tambahan. Menurut Ghozali (2013), heteroskedastisitas tidak ada jika p-value dari absolute residual lebih besar dari 0,05 jika dibandingkan dengan variabel independen (Ghozali, 2013).

### 3.7.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan independen, serta apakah masing-masing variabel independen berkorelasi positif atau negatif. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 . X_1 + b_2 . X_2 + e$$

Keterangan:

- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- Y = Pemberdayaan Masyarakat
- X<sub>1</sub> = Transparansi
- X<sub>2</sub> = Akuntabilitas
- e = Disturbance Error

### 3.7.6 Uji Hipotesis

Sugiyono (2013) berpendapat bahwa hipotesis adalah: “Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun langkah-langkah dalam menguji hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternative ( $H_a$ ), pemilihan tes statistik dan perhitungannya, menetapkan tingkat signifikansi, dan penetapan kriteria pengujian”. Sebelum melakukan pengujian, penting untuk menetapkan ambang batas signifikansi. Dengan melakukan hal ini, hal ini membantu dalam menetapkan batasan yang jelas untuk pengujian hipotesis, yang pada gilirannya memfasilitasi pemilihan antara hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dan hipotesis nol ( $H_0$ ). Studi ini mempunyai tingkat kepercayaan sejumlah 95% dan kriteria signifikansi sejumlah 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ). Angka ini digunakan karena mewakili tingkat kepentingan yang diakui secara umum dalam studi ilmu sosial dan dapat menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

- a. Jika tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen.
- b. Jika nilai  $t$  diatas ambang batas signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ), maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel dependen dan independen.

#### 1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted $R^2$ )

Menurut Ghozali (2013),  $R^2$  merupakan metrik yang mengkuantifikasi kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat.  $R^2$  didefinisikan dalam rentang 0 hingga 1, inklusif. Jika variabel independen mempunyai nilai yang rendah, maka variabel tersebut hanya dapat menjelaskan sebagian variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 menandakan bahwa variabel independen mempunyai daya prediksi yang tinggi terhadap perubahan variabel dependen. Adjusted  $R^2$  digunakan sebagai metrik dalam studi ini karena kemampuannya dalam memberikan penilaian model regresi yang lebih akurat.

#### 2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2013), tujuan utama uji F adalah untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model mempunyai dampak kolektif terhadap variabel dependen. Apabila salah satu variabel independen mempunyai nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau nilai

signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2013), Uji F menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

- R<sup>2</sup> = Koefisien determinasi
- K = Banyaknya variabel independen
- n = Banyaknya anggota sampel

### 3. Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghazali (2013), uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2013), untuk melakukan uji t menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

- T = Distribusi t
- R = Koefisien korelasi
- r<sup>2</sup> = Koefisien determinasi
- N = Jumlah data

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 dan nilai t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Desa Banjarwangi**

Desa Banjarwangi merupakan salah satu Desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ciawi yang mempunyai luas wilayah 1,097 Km<sup>2</sup>, di atas permukaan laut 3,70 M dengan tinggi curah hujan 120 M<sup>3</sup>. Desa Banjarwangi dikelilingi oleh desa-desa lain disekitarnya, yang batas-batas wilayah administrasinya sebagai berikut:

<b>Batas</b>	<b>Desa/Kel</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kabupaten</b>
Sebelah utara	: BANJARWARU	: CIAWI	BOGOR
Sebelah selatan	: CITAPEN	: CIAWI	BOGOR
Sebelah timur	: BANJARSARI	: CIAWI	BOGOR
Sebelah barat	: TELUK PINANG	: CIAWI	BOGOR

Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang pada prinsipnya penyelenggaraan Desa diarahkan untuk selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Sehingga nantinya setiap Desa bisa menggali potensi dirinya dalam membangun daerahnya, sesuai kemampuan dan skala prioritas yang ada. Begitu pula dengan Desa Banjarwangi sampai saat ini terus berbenah diri membangun desa dengan mengandalkan swadaya dan partisipasi masyarakat.

Cita-cita yang ingin dicapai segenap warga Desa Banjarwangi dirumuskan dalam **Visi Desa Banjarwangi** merupakan hasil diskusi baik formal maupun informal perwakilan warga Desa Banjarwangi atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai representasi dari warga Desa Banjarwangi yang semakin mendekatkan Visi Desa Banjarwangi dengan kenyataan yang ada di desa dan masyarakat yang ada pada saat ini maupun ke depan serta diselaraskan dengan visi dan misi jangka panjang maupun jangka menengah.

##### **4.1.2 Visi dan Misi Desa Banjarwangi**

Program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi dan misi desa. Adapun visi dan misi desa Banjarwangi adalah

sebagai berikut:

- VISI

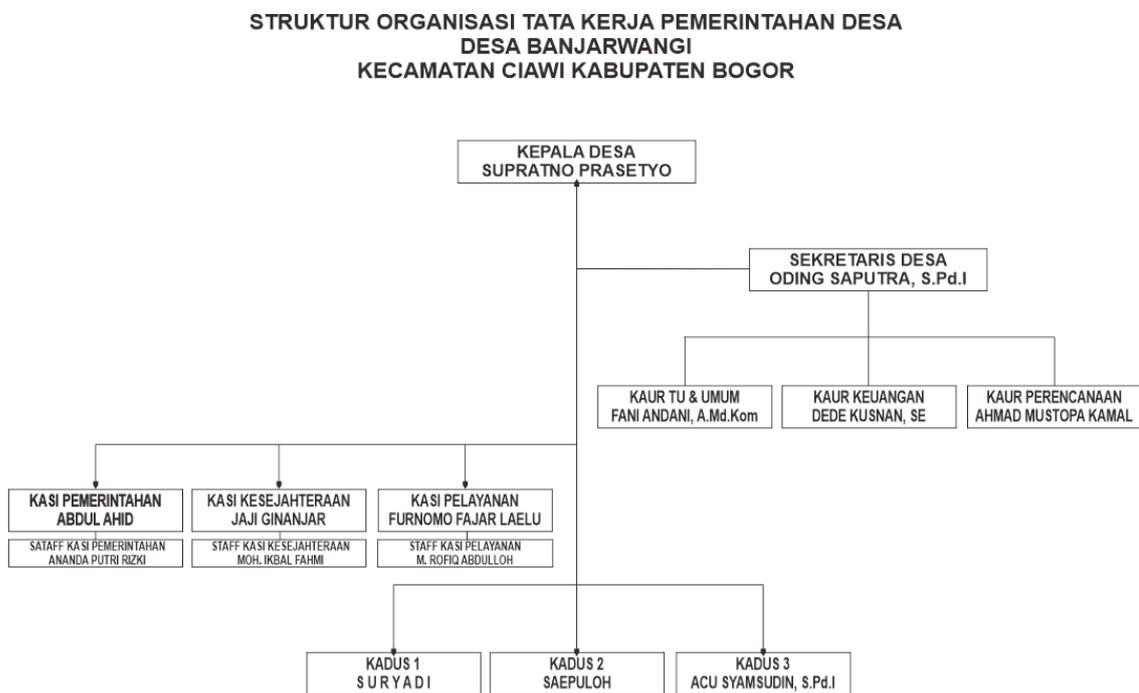
“MEWUJUDKAN DESA BANJARWANGI MENJADI DESA MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, PRODUKTIF, AGAMAIS”

- MISI

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing.
2. Memberikan pemenuhan segala hak hak kebutuhan dasar warga masyarakat Desa Banjarwangi.
3. Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan.
4. Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstra kurikuler kepemudaan.
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggung jawab.
6. Merancang website portal berita desa agar pembangunan desa lebih transparan kepada masyarakat Desa Banjarwangi maupun masyarakat luas.
7. Membangun Kemitraan Pemerintah swasta.
8. Pemenuhan gizi ibu dan anak.

### 4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banjarwangi

**Tabel 4. 1 Struktur Organisasi**



### 4.2 Deskriptif Data Penelitian

Data penelitian dalam studi ini adalah dikumpulkan dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yaitu Perangkat Desa beserta staff,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kuesioner tersebut diperoleh peneliti dengan cara menemui responden secara langsung dan memberikannya kepada responden untuk diisi. Pengambilan data secara langsung dengan menemui responden tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar lebih efektif.

Responden tersebut diberikan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam studi ini menggunakan sampel jenuh, dimana sampel tersebut merupakan menggunakan populasi yang relatif kecil dan menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 dan 30 November 2023.

Tabel 4.2 dibawah ini menunjukkan rincian pembagian dan pengembalian kuesioner. Tabel tersebut juga menginformasikan tingkat pengembalian (*response rate*) dan tingkat pengembalian yang digunakan (*usable response rate*).

**Tabel 4. 2 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Kuesioner yang dikirim	100
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang dapat digunakan	100
Kuesioner yang tidak kembali (100-100)	0
Tingkat pengembalian kuesioner (100/100 x 100%)	100%
Tingkat pengembalian yang digunakan (100/100 x 100%)	100%

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 kuesioner. Setelah pengecekan tidak ada kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya sehingga seluruh kuesioner dapat digunakan. Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sejumlah 100%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner yang kembali tanpa memperhitungkan kelayakan responden (100 kuesioner) dibagi total yang dikirim (100 kuesioner). Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan (*usable respons rate*) sejumlah 100%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner dengan memperhitungkan kelayakan responden (100 kuesioner) dibagi total kuesioner yang dikirim (100 kuesioner).

#### 4.2.1 Transparansi

**Tabel 4. 3 Tabel Skor Rataan Transparansi**

TRANSPARANSI (X1)									
Indikator	X1	Skala Pengukuran					Rataan	Skor Rataan	
		SS	S	N	TS	STS		Nilai	Ket.
<b>Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen</b>	X1.1	54	29	17	0	0	4,16	4,16	Tinggi
<b>Kejelasan dan kelengkapan Informasi</b>	X1.2	32	34	34	0	0	3,79	3,79	Tinggi
<b>Keterbukaan Proses</b>	X1.3	44	29	27	0	0	3,97	3,97	Tinggi
<b>Kerangka regulasi yang menjamin Transparansi</b>	X1.4	33	45	22	0	0	3,91	3,91	Tinggi
<b>Skor Rataan Variabel Transparansi</b>								<b>3,95</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 didapat hasil dari skor rataan penilaian responden mengenai Transparansi pada Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Memiliki hasil yang beragam. Pada indikator ketersediaan dan aksesibilitas dokumen memiliki skor sejumlah 4,16 atau tinggi yang menunjukkan bahwa musyawarah yang melibatkan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Pada kejelasan dan kelengkapan informasi memiliki skor sejumlah 3,79 atau tinggi menunjukkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Pada indikator keterbukaan proses memiliki skor sejumlah 3,97 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan proses pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Pada indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi memiliki skor sejumlah 3,91 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan mengenai pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan skor rataan untuk

Transparansi yang memperoleh skor sejumlah 3,95 menunjukkan Transparansi pengelolaan dana desa memiliki nilai yang baik terhadap pengelolaan dana desa.

#### 4.2.2 Akuntabilitas

**Tabel 4. 4 Tabel Skor Rataan Akuntabilitas**

<b>AKUNTABILITAS (X2)</b>									
<b>Indikator</b>	<b>X2</b>	<b>Skala Pengukuran</b>					<b>Rataan</b>	<b>Skor Rataan</b>	
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>		<b>Nilai</b>	<b>Ket.</b>
<b>Ketercapaian tujuan pengelolaan Dana Desa</b>	X2.1	51	39	10	0	0	4,2	4,2	Tinggi
<b>Keterlibatan pemerintah Desa</b>	X2.2	32	46	22	0	0	3,90	3,90	Tinggi
<b>Pengawasan tim Pelaksana</b>	X2.3	49	43	8	0	0	4,2	4,2	Tinggi
<b>Laporan pengelolaan Dana Desa</b>	X2.4	44	40	16	0	0	4,07	4,07	Tinggi
<b>Skor Rataan Variabel Akuntabilitas</b>								<b>4,09</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 didapat hasil dari skor rata-rata penilaian responden mengenai Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Memiliki hasil yang beragam. Pada indikator ketercapaian tujuan pengelolaan dana desa memiliki skor sejumlah 4.2 atau tinggi yang menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan dalam pengelolaan dana desa memang baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Pada indikator keterlibatan pemerintah desa memiliki skor sejumlah 3.90 atau tinggi menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa memang baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Pada indikator pengawasan tim pelaksana memiliki hasil nilai 4,2 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tim pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Pada indikator laporan pengelolaan desa memiliki hasil nilai 4,07 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa laporan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang cukup baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan skor rata-rata untuk Akuntabilitas yang memperoleh skor sejumlah 4.09 menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa

memiliki nilai yang baik terhadap pengelolaan dana desa.

#### 4.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

**Tabel 4. 5 Tabel Skor Rataan Pemberdayaan Masyarakat**

<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(Y)</b>									
<b>Indikator</b>	<b>Y</b>	<b>Skala Pengukuran</b>					<b>Rataan</b>	<b>Skor Rataan</b>	
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>		<b>Nilai</b>	<b>Ket.</b>
<b>Kemampuan</b>	Y1.1	48	43	9	0	0	4,18	4,18	Tinggi
<b>Kepercayaan</b>	Y1.2	31	55	14	0	0	3,97	3,97	Tinggi
<b>Wewenang</b>	Y1.3	40	56	4	0	0	4,15	4,15	Tinggi
<b>Tanggungjawab</b>	Y1.4	45	48	7	0	0	4,17	4,17	Tinggi
<b>Skor Rataan Variabel Pemberdayaan Masyarakat</b>								<b>4,11</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 didapat hasil dari skor rataan penilaian responden mengenai Pemberdayaan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Memiliki hasil yang beragam. Pada indikator kemampuan memiliki skor sejumlah 4,18 atau tinggi yang menunjukkan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah memang baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Pada indikator kepercayaan memiliki skor sejumlah 3,97 atau tinggi menunjukkan bahwa kepercayaan dalam pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa memang baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Pada indikator wewenang 4,15 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa wewenang yang diberikan oleh pemerintah Desa memang baik bagi para masyarakat Desa Banjarwangi. Pada indikator tanggungjawab memiliki skor sejumlah 4,17 atau tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa Tanggungjawab yang diberikan pemerintah desa memang baik bagi masyarakat Desa Banjarwangi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan skor rataan untuk Pemberdayaan masyarakat yang memperoleh skor sejumlah 4,11 menunjukkan pemberdayaan masyarakat memiliki nilai yang baik terhadap masyarakat Desa Banjarwangi.

#### 4.2.4 Hasil Uji Intrumen Penelitian

##### 1. Uji Validitas

Setelah mendapatkan data dari kuesioner, untuk menguji apakah

kuesioner tersebut valid atau tidak, maka dilakukan uji validitas ini. Dalam studi ini, untuk mengukur validitas suatu data dilaksanakan dengan menggunakan bantuan dari program SPSS. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas data ini adalah:

1. Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan degree of freedom (df) adalah  $n$  (jumlah sampel) – 2, maka item kuesioner tersebut valid.
2. Sebaliknya, apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  dengan df adalah  $n - 2$ , maka item tersebut dikatakan tidak valid.

Dalam pengujian validitas di studi ini,  $H_0$  adalah pertanyaan dan atau pernyataan yang telah valid. Sebab itu,  $H_0$  diterima jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . df dihitung dengan  $df = 100 - 2 = 98$ . Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %. Sehingga,  $r_{tabel} = 0,196$ .

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya  $r_{hitung}$ , peneliti menggunakan bantuan SPSS dengan melakukan persamaan item correlation, yaitu dengan melihat kolom corrected item – total correlation. Dari hasil yang diperoleh dalam kolom tersebut, maka selanjutnya hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan  $r_{tabel}$ . Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Transparansi**

No	Pearson Correlation	$R_{tabel}$	Batas Sign	Keterangan
1	0,905	0,196	0,000	Valid
2	0,906	0,196	0,000	Valid
3	0,902	0,196	0,000	Valid
4	0,915	0,196	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 3 menunjukkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel transparansi dari item 1 sampai item 4 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  product moment.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas**

No	Pearson Correlation	$R_{tabel}$	Batas Sign	Keterangan
1	0,934	0,196	0,000	Valid
2	0,938	0,196	0,000	Valid
3	0,939	0,196	0,000	Valid
4	0,943	0,196	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 3 menunjukkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel transparansi dari item 1 sampai item 4 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena

nilai  $r_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  product moment.

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Pemberdayaan Masyarakat**

No	Pearson Corelation	$R_{tabel}$	Batas Sign	Keterangan
1	0,920	0,196	0,000	Valid
2	0,917	0,196	0,000	Valid
3	0,917	0,196	0,000	Valid
4	0,912	0,196	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 3 menunjukkan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan untuk variabel transparansi dari item 1 sampai item 4 tersebut valid/layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $r_{tabel}$  product moment.

## 2. Uji Reliabilitas

Dalam studi ini Uji Reliabilitas yang digunakan adalah program SPSS. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah jawaban responden atas pertanyaan dan pernyataan survei dapat diandalkan. Dalam studi ini, uji reliabilitas dilaksanakan dengan menggunakan uji statistik. *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ), dimana nilai dari  $\alpha$  tersebut tidak boleh kurang dari 0,6. Berikut hasil uji reliabilitas dalam studi ini:

**Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas**

No	Nama Variabel	Cronbach Alpha	$\alpha$ (Koefisien Cronbach alpha)	Keterangan
1	Variabel Trabnsparansi	0,928	0,6	Reliabel
2	Variabel Akuntabilitas	0,955	0,6	Reliabel
3	Variabel Pemberdayaan Masyarakat	0,936	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran diatas menunjukkan bahwa nilai cronch alpha dari variabel transparansi adalah sejumlah 0,928, nilai cronch alpha variabel akuntabilitas adalah sejumlah 0,955, dan nilai cronch alpha dari variabel pemberdayaan masyarakat adalah sejumlah 0,936. Hasil  $\alpha$  (koefisien Cronbach alpha) dari setiap variabel tersebut telah menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,6. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel dalam studi ini telah reliable.

### 4.2.5 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran objek pengamatan secara

umum, dalam studi ini digunakan statistik deskriptif. Pada studi ini, statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean, dan simpangan baku (standar deviasi) dengan N merupakan banyaknya responden dalam penelitian. Deskriptif statistik semua variabel yang digunakan dalam model disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 10 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi (X1)	100	4	19	11.29	3.582
Akuntabilitas (X2)	100	4	20	11.51	4.272
Pemberdayaan masyarakat (Y)	100	4	20	11.63	3.773
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang digunakan dalam studi ini sebanyak 100 sampel. Data variabel transparansi memiliki nilai minimum sejumlah 4, nilai maksimum sejumlah 19, rata-rata sejumlah 11.29, dan standar deviasi sejumlah 3.582. Variabel akuntabilitas memiliki nilai minimum sejumlah 4, nilai maksimum sejumlah 20, rata-rata sejumlah 11.51, dan standar deviasi sejumlah 4.272. Variabel pemberdayaan masyarakat memiliki nilai minimum sejumlah 4, nilai maksimum sejumlah 20, rata-rata sejumlah 11.63, dan standar deviasi sejumlah 3,773

#### 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi dan variabel residual mempunyai distribusi yang normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual haruslah normal, karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid.

Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, studi ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov dan menggunakan analisis grafik. Kriteria pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

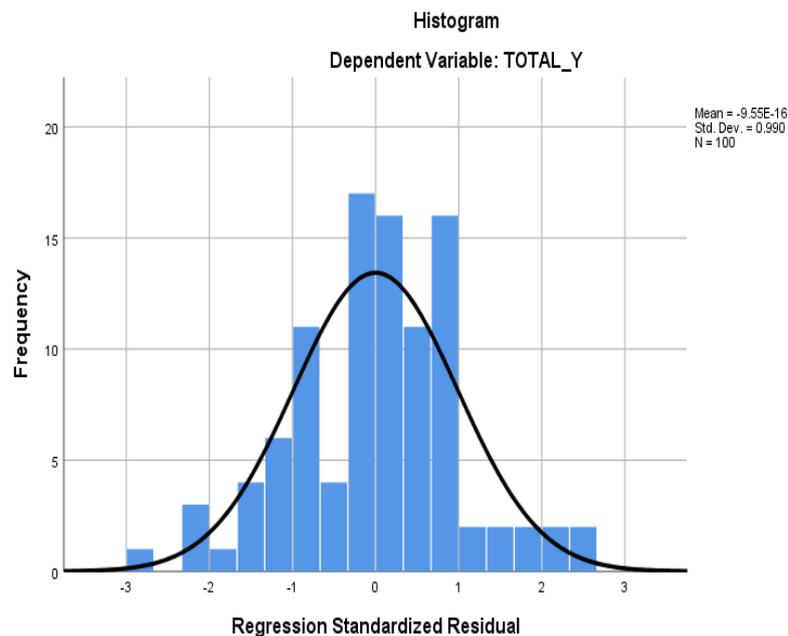
- Jika signifikansi  $> 0,05$  maka data tersebut berdistribusi normal
- Jika signifikansi  $< 0,05$  maka data tersebut berdistribusi tidak normal.

Pada studi ini, uji normalitas data dapat digambarkan melalui tabel berikut:

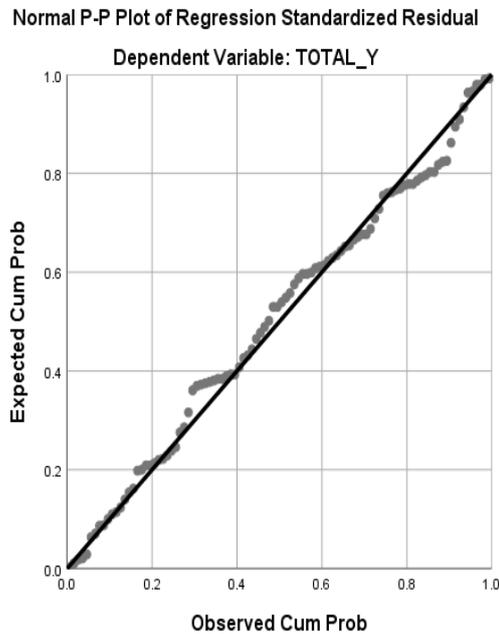
**Tabel 4. 6 Hasil Output Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,91212203
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,072
	Negative	-,069
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah, 2024



Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran diatas menunjukkan bahwa nilai dari uji Kolmogorov dalam studi ini adalah data berdistribusi normal dengan hasil 0,200. Data tersebut menjelaskan bahwa variabel bebas dan variabel terikat dapat saling berdistribusi karena hasil yang diperoleh melebihi kriteria dari uji Kolmogorov sejumlah  $0,200 > 0,05$ . Hal tersebut juga dapat di gambarkan pada diagram plot sebagai berikut:



Data diolah, 2023

Gambar 4. 1 Grafik Uji Normalitas Data Histogram dan Data Probability Plot Sumber:

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar tersebut menunjukkan bahwa garis diagonal dalam grafik menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal. Titik-titik yang berada di sekitar garis merupakan keadaan data. Dimana titik-titik tersebut dekat dengan garis dan terlihat ada yang menempel pada garis. Maka dapat disimpulkan jika data mengikuti distribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (variance inflation factor). Kriteria pengambilan keputusan uji ini yaitu : Jika nilai Tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$  menunjukkan adanya multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai Tolerance  $\geq 10$  atau sama dengan nilai VIF  $\leq 10$  menunjukkan tidak adanya multikolinieritas. Sehingga, untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji multikolonieritas dalam studi ini:

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,554	,306		1,810	,073		
	Transparansi (X1)	,497	,049	,472	10,216	,000	,283	3,536
	Akuntabilitas (X2)	,475	,041	,538	11,657	,000	,283	3,536

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran diatas menunjukkan bahwa untuk masing- masing nilai VIF dari variabel bebas yaitu Transparansi memiliki hasil tolerance 0.283 dan VIF 3,536. Sedangkan untuk Akuntabilitas memiliki hasil tolerance 0.283 dan VIF 3,536 yang berarti nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ . Dengan hasil dari tabel tersebut, disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut sebagai heteroskedastisitas.

Dalam menentukan heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dapat dilihat dengan cara menghasilkan regresi nilai absolut residual (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Dalam pelaksanaan uji glejser tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,804	,190		4,220	,000
	Transparansi (X1)	-,018	,030	-,116	-,607	,546
	Akuntabilitas (X2)	,010	,025	,074	,386	,700

a. Dependent Variable: RES\_2

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut adalah sejumlah 0,546 untuk variabel transparansi, dan variabel akuntabilitas sejumlah 0,700. Nilai-nilai yang diperoleh seluruh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dalam uji ini harus di atas 0,05. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam studi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam studi ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Pengolahan data analisis regresi linear berganda ini dilaksanakan dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil yang diperoleh dari proses penghitungan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 9 Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,554	,306		1,180	,073
	Transparansi (X1)	,497	,049	,472	10,216	,000
	Akuntabilitas (X2)	,475	,041	,538	11,657	,000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 3 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas X1 (transparansi) sejumlah 0,497, dan koefisien variabel bebas X2 (akuntabilitas) sejumlah 0,475. Sebab itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = 0,554 + 0,497 X1 + 0,475 X2 + e$$

Dimana:

- Y = Pemberdayaan Masyarakat
- X1 = Transparansi
- X2 = Akuntabilitas
- E = *Standard error*

Berdasarkan persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat dapat diterangkan bahwa

1. Nilai konstanta yang diperoleh sejumlah 0,554 artinya apabila semua variabel independen yaitu Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai nilai konstanta, maka pemberdayaan masyarakat memiliki nilai sejumlah 0,554.
2. Nilai koefisien pada variabel transparansi (X1) bernilai 0,497 . Nilai tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan transparansi dalam pengelolaan dana desa sejumlah 1, maka pemberdayaan akan naik sejumlah 0,497 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X2) bernilai 0,475. Nilai koefisien regresi tersebut berarti bahwa apabila akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mengalami penurunan sejumlah 1, maka pemberdayaan masyarakat akan mengalami penurunan sejumlah 0,475 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dari model regresi adalah tetap.

#### 4.5 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji determinasi ini dilakukan untuk melihat dan mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen Transparansi (X1), dan Akuntabilitas (X2) terhadap variabel dependen Y Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,970 <sup>a</sup>	,942	,940	,92148

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square (Koefisien Determinasi) sejumlah ,940 yang mana menunjukkan bahwa variabel dependen (Y) yang mampu dijelaskan oleh variabel independen X1 dan X2 sejumlah 94,2%. Sedangkan sisanya sejumlah 5,8% (100% -94,2%) dijelaskan oleh variabel lainnya diluar dari pembahasan ini yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dan tingkat signifikansi variabel Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Pengaruh dan tingkat signifikansi ini menunjukkan keberartian hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk suatu penelitian.

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1326,945	2	663,473	781,364	,000 <sup>b</sup>
	Residual	82,365	97	,849		
	Total	1409,310	99			
a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)						
. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)						

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran tersebut menunjukkan bahwa pada tabel Anova atau F-test didapatkan  $F_{hitung}$  781.364. Nilai ini dipergunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu  $F_{hitung}$  781.364 >  $F_{table}$  3,09. Dengan kata lain bahwa transparansi, dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan.

## 3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini, uji t mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t :

- H1 diterima dan hasilnya signifikan jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau jika nilai Sig < 0,05
- H1 ditolak dan hasilnya tidak signifikan jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau jika nilai Sig > 0,05

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut :

**Tabel 4. 12 Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,554	,306		1,180	,073
	Transparansi (X1)	,497	,049	,472	10,216	,000
	Akuntabilitas (X2)	,475	,041	,538	11,657	,000

a. Dependent Variable: Pemberdayaan Masyarakat (Y)

Sumber: Data diolah, 2024

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran tersebut menunjukkan dari hasil pengujian uji t di atas yang menggunakan program SPSS, dapat disimpulkan bahwa:

#### 1. Variabel Transparansi

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran diatas menunjukkan bahwa hipotesis transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dalam tabel tersebut nilai  $t_{hitung}$  adalah sejumlah 10,216 dan nilai  $t_{tabel}$  adalah sejumlah 1,660. Dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 dimana nilai signifikannya tidak lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $10,216 > 1,660$ ) dan nilai Sig sebesar  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh sebab itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara transparansi dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

#### 2. Variabel Akuntabilitas

Sebagaimana dapat dilihat pada lampiran diatas menunjukkan bahwa hipotesis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$  sejumlah -11,657 dan nilai  $t_{tabel}$  sejumlah 1,660. Dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 dimana nilai signifikannya tidak lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $11,657 > 1,660$ ) dan nilai Sig sebesar  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$

ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh sebab itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara akuntabilitas dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

#### **4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data**

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh transparansi ( $X_1$ ), dan akuntabilitas ( $X_2$ ) terhadap pemberdayaan masyarakat ( $Y$ ), maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut. Penelitian tersebut dilaksanakan peneliti untuk menjawab permasalahan dengan judul “Pengaruh Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.” Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 25, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

##### **4.6.1 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor**

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Transparansi merupakan salah satu hal yang penting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah mempunyai wewenang dalam penentuan keputusan penting, dimana keputusan tersebut juga mempunyai dampak bagi orang banyak. Sebab itu, dalam hal ini pemerintah desa juga harus menyediakan informasi yang lengkap menyangkut segala hal yang telah dikerjakannya.

Dalam studi ini menunjukkan bahwa hasil uji tersebut memiliki pengaruh secara parsial dan simultan, transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pemerintah desa terhadap mengelola dana desa. Hal tersebut didukung dengan banyak yang menjawab setuju pada setiap pertanyaan yang telah disediakan. Pengelolaan dana desa yang dikatakan transparan dan akuntabel apabila dalam menjalankan pemerintahnya, pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya.

Selain analisis di atas, berdasarkan hasil uji data yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  dalam variabel transparansi ini sejumlah 10,216 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  adalah sejumlah 1,660, sedangkan hasil uji pada nilai  $t_{hitung}$  dalam variabel akuntabilitas sejumlah 11,657 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  adalah sejumlah -1,660. Sebab itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa antara transparansi dan akuntabilitas dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan

Ciawi Kabupaten Bogor terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara transparansi dan akuntabilitas dengan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Penelitian dengan variabel transparansi dan akuntabilitas ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Indah Kurniati (2022) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $10,216 < 1,660$ ) yang artinya  $H_1$  diterima. Sebab itu dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara parsial.
2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $11,657 < 1,660$ ) yang artinya  $H_2$  diterima. Sebab itu dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara parsial.
3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $781,364 > 3,09$ ) yang artinya  $H_3$  diterima. Sebab itu dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh secara simultan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut :

##### **1. Saran untuk Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa Banjarwangi diharapkan lebih meningkatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, agar terwujudnya Desa yang mandiri dan pemerintahan desa yang baik tetap dapat dipertahankan.

##### **2. Saran untuk Akademis**

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian yang telah dilakukan dapat

dipergunakan sebagai referensi dan kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tentang dana desa, yaitu dengan memperluas sampel dan objek penelitian sehingga hasil selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih untuk peneliti, instansi, dan pihak lain serta bertujuan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran lebih luas dan terkini mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan lebih dari 2 variabel dependen, dikarenakan untuk selanjutnya hasil pemahaman yang akan diberikan lebih luas dan terkini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Y., & Nimasari, P. E. (2018). Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. *Jurnal Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. Vol. 6, No. 1., 45–67.
- Ardiyanti, Rika. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Universitas Negeri Walisongo Semarang*.
- Boseke, Monika Meysi. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tumaratas Satu Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Unsrat*.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02).
- Dilago, R. et all. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. [jurnal]. *Universitas Sam Ratulangi. Manado*.
- Erganda, IS., Marota, R., & Ilmiyono, AF. (2021). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi* , 8 (2).
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kristianten. 2014. *Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value For Money pada Instansi pemerintahan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Lubis. 2016. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makasar: Graha Ilmu.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit

Andi.

Mardikanto, T. & Soebianto, P. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam erspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 258-280.

Ruru, Novianti., Kalangi, Lintje., & Budiarmo, Novi. S. (2017). Analisis Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), 83- 90.

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Cetakan ke19. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Cetakan ke19. Bandung: Alfabeta.

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.

Supomo, N. I. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntan dan Manajemen. Yogyakarta: BPFEE.

Syafi'i, R. et all. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. [jurnal]. Universitas Islam Malang.

Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus pada desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi). [skripsi]. Universitas Halu Oleo. Kendari.

Undang-Undang RI No. 6 tahun 2014. Tentang Desa.

Utami, Ajeng Dini. (2019). Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa. Temanggung : Desa Pustaka Indonesia

## LAMPIRAN

### Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

### Petunjuk Pengisian

1. Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang dipilih sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu
2. Pada masing-masing pernyataan, terdapat lima alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut :
  - a. Sangat Setuju (SS) = 5
  - b. Setuju (S) = 4
  - c. Netral (N) = 3
  - d. Tidak Setuju (TS) = 2
  - e. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

### Daftar Pernyataan

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
<b>Transparansi (X1)</b>						
1	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) dapat meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan dana desa.					
2	Laporan keuangan dan pemaparan program Pemerintahan Desa mudah diakses oleh publik.					
3	Pemerintah Desa memaparkan segala aktivitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat.					
4	Pemerintah Desa mencantumkan kebijakannya secara tertulis dan mengungkapkannya kepada pihak yang berkepentingan.					
<b>Akuntabilitas (X2)</b>						
5	Penyaluran dana desa dilakukan dengan					

	melihat kebutuhan masyarakat.					
6	Program-program yang dilakukan Pemerintah Desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					
7	Proses dan pertanggungjawaban dalam perancangan dana desa diawasi secara terus menerus,					
8	Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun.					
<b>Pemberdayaan Masyarakat (Y)</b>						
<b>Kemampuan</b>						
9	Pelatihan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai teknologi yang tersedia sebagai pendukung aktivitas.					
<b>Kepercayaan</b>						
10	Informasi yang diberikan mengenai pengelolaan dana desa yang ditanggapi serius oleh masyarakat.					
<b>Wewenang</b>						
11	Masyarakat yang diberikan wewenang dalam menyampaikan aspirasi.					
<b>Tanggung Jawab</b>						
12	Tanggung Jawab yang diberikan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.					



# Universitas Pakuan

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A" S1 Bisnis Digital "Terakreditasi"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1210 /WD.1/FEB-UP/X/2023 07 Oktober 2023  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data

Kepada : Yth. Pimpinan / Direktur.  
BALAI DESA BANJARWANGI.  
Jl. Balai Desa Banjarwangi, Kecamatan Ciawi  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720.

Dengan hormat.

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

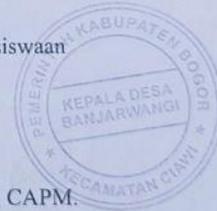
Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Naufal Ramadhan Fadhillah  
NPM : 022118206  
Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.



Tembusan :  
Yth. Bapak Dekan FEB – UP (Sebagai Laporan).

Website : <https://feb.unpak.ac.id/> e-mail : [febkonomi@unpak.ac.id](mailto:febkonomi@unpak.ac.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN CIAWI**

Kantor: Jl. Raya Ciawi – Puncak Km. 0,96 (0251) 8240234 16720 Ciawi  
website: <https://kecamatan-ciawi.bogorkab.go.id> e-mail: [kecciawi@kabogor.go.id](mailto:kecciawi@kabogor.go.id)

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 000.9.2-696 –Sekret

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor : 000.9.2/705-Bakesbangpol tanggal 26 Oktober 2023, perihal Rekomendasi Penelitian.

Atas dasar tersebut di atas, memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **NAUFAL RAMADHAN FADHILLAH**  
Alamat Perguruan Tinggi : Vila Bogor Indah Blok HH.3 / 12 RT 006 RW 012 Kel / Desa  
Ciparigi Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor  
Penanggung Jawab : Dr. RETNO MARTIANI ENDAH LESTARI, SE., M.Si., CMA.,  
CAPM  
Jumlah Peserta : 1 ( Satu ) Orang  
Waktu : 24 Oktober 2023 s/d 22 desember 2023  
Tempat : Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

**Dengan Ketentuan :**

1. Mentaati seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bogor;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan diluar ketentuan yang ditetapkan diatas;
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian atas perhatiannya, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ciawi, 01 November 2023



**Tembusan :**

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.



## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914  
Telp/Fax. (021) 8756836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 16 Oktober 2023

Nomor : 000.9.2 / 105 - Bakesbangpol  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth.  
Camat Ciawi Kabupaten Bogor  
di  
Ciawi

#### Dasar :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengerembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

#### Menimbang :

Surat Wakil Dekan Bidang Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Nomor : 1240/WD.1/FEB-UP/X/2023, Tanggal 17 Oktober 2023, Perihal Permohonan Riset/ Magang/ Data.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **NAUFAL RAMADHAN FADHILLAH**  
Alamat : Vila Bogor Indah Blok HH.3/12 Rt 006 Rw 012 Kel/Desa Ciparigi Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor  
Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor  
Penanggung Jawab : **Dr. RETNO MARTANTI ENDAH LESTARI, S.E., M.Si., CMA., CAPM.**  
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang  
Waktu : 24 Oktober 2023 s.d 22 Desember 2023  
Tempat : Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentrangan dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya mengucapkan terima kasih.



e-sign Kabupaten Bogor



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR**

**Drs. BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV.c

#### Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Dekan Bidang Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara